

TERPILIHNYA MAHATHIR MOHAMAD SEBAGAI PERDANA MENTERI DAN HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA

7

Lisbet

Abstrak

Pemilu Malaysia yang diselenggarakan pada 9 Mei 2018 telah dimenangkan oleh Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad. Hal ini mengejutkan banyak pihak, karena selama enam puluh tahun Koalisi Barisan Nasional yang saat ini dipimpin Perdana Menteri Petahana Najib Razak selalu memenangkan Pemilu. Terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 ini memberikan harapan baru, tidak hanya bagi masyarakat Malaysia yang menghendaki pemerintahan yang bersih dari korupsi, melainkan juga memberikan harapan positif terhadap hubungan Indonesia-Malaysia yang menghendaki adanya peningkatan kerja sama bilateral. Indonesia dan Malaysia, perlu mengarahkan hubungan bilateralnya ke arah kerja sama yang lebih konstruktif. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia yang konstruktif ini perlu didukung oleh masyarakat dan juga parlemen kedua negara.

Pendahuluan

Pemungutan suara untuk memilih anggota Parlemen di Malaysia telah dilaksanakan pada 9 Mei 2018 dan dimenangkan oleh koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad. Kemenangan ini cukup mengejutkan dunia internasional, karena selama enam dekade koalisi Barisan Nasional yang saat ini dipimpin oleh Najib Razak selalu memenangkan Pemilu. Kekalahan koalisi Barisan nasional pada pemilu 2018 ini menandakan kuatnya pemilih dan antusiasme masyarakat di Malaysia yang menginginkan perubahan untuk

memperoleh pemerintahan yang bersih dari korupsi, apalagi dalam kondisi Malaysia yang sedang terpuruk saat ini.

Kondisi terpuruk ditandai dengan tingginya biaya hidup sehari-hari karena harga barang mahal dan nilai tukar mata uang ringgit mengalami penurunan tajam selama beberapa tahun berakhir. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan pajak barang dan jasa yang baru. Pada tahun 2017, Produk Domestik Bruto-nya mencapai USD 926,1 miliar, namun utang pemerintah telah mencapai 52,5% dari PDB. Selain itu, jumlah angkatan



kerja pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 14,94 juta sedangkan jumlah penduduknya sampai pada Juli 2017 telah mencapai sebesar 31.381.992. (*Kompas*, 5 Mei 2018).

Buruknya perekonomian Malaysia ini semakin diperparah dengan adanya kasus dugaan penyalahgunaan dana sebesar USD 681 juta dari 1MDB (*1 Malaysia Development Berhad*), Badan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh Mantan Perdana Menteri Najib Razak. Padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendorong perekonomian nasional Malaysia. Hal ini terungkap ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) merilis dokumen gugatan yang menuding bahwa dana 1MDB telah digunakan oleh Najib Razak, melalui pencucian uang dengan rekening-rekening di AS.

Terpilihnya Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, menandakan kuatnya keinginan masyarakat terutama kalangan bawah agar kondisi perekonomian Malaysia dapat lebih baik lagi. Kondisi perekonomian Malaysia yang meningkat diharapkan tidak saja akan memberikan pengaruh positif di dalam negeri melainkan juga di luar negeri, termasuk dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Tulisan ini membahas bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia setelah terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Kepemimpinan Mahathir dan Hubungan RI-Malaysia Terdahulu

Mahathir Mohamad sebelumnya pernah menjadi perdana menteri dan memimpin Malaysia selama 22 tahun, yakni sejak 1981 hingga 2003. Selama kepemimpinannya tersebut, Malaysia dikenal sebagai negara yang

stabil, memiliki keberagaman budaya serta peningkatan perekonomian yang cukup mengesankan. Bahkan, Malaysia pun bisa bertahan melalui krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-1998.

Selain sukses memimpin Malaysia, Mahathir juga menjadi tokoh yang memiliki peran penting di ASEAN. PM Mahathir sangat mendukung penguatan solidaritas di kawasan ASEAN. Di bawah kepemimpinan Mahathir, Malaysia senantiasa bergerak aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Di ASEAN, Mahathir turut berkontribusi penting dalam proses perluasan keanggotaan ASEAN yang semula 5 negara, menjadi 10 negara (ditambah Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam).

Di bawah Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981-2003, faktor terpenting dari kebijakan luar negerinya adalah memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan Malaysia dengan negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan visi pengembangan perekonomian Malaysia. Pengembangan perekonomian Malaysia menjadi prioritas Pemerintahan Mahathir agar Malaysia dapat berperan penting dalam perekonomian internasional. Salah satu cara yang dilakukan Mahathir adalah mempererat hubungan bilateral Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia yang dianggap memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara.

Setelah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Agustus 1981, Mahathir melakukan kunjungan resminya yang pertama ke Indonesia sebagai Perdana Menteri, dan beberapa kali sesudahnya, dalam

rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa Mahathir menginginkan adanya hubungan khusus yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menjadi mitra penting bagi Malaysia karena selain wilayahnya yang berdekatan, kedua negara juga merupakan negara serumpun dan mayoritas warga negaranya pun beragama Islam. Selain itu, Malaysia juga membutuhkan Indonesia untuk bersama-sama memainkan peranan penting dalam memperkuat kerja sama ASEAN.

Prospek Hubungan Indonesia-Malaysia

Pada usianya yang ke-92, Mahathir Mohamad kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Kemenangan Mahathir dalam pemilu 9 Mei lalu mengejutkan banyak pihak karena pada pemilu kali ini, koalisi yang mengusung Mahathir adalah Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional yang dulu pernah dipimpinnya. Meskipun demikian, terpilihnya Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri disambut baik oleh dunia internasional, termasuk Indonesia. Mengacu pada pengalaman masa lalu, besar harapan Indonesia agar Perdana Menteri Mahathir Mohamad memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama untuk

menyikapi persoalan-persoalan yang menjadi perhatian bersama. Persoalan pertama yang perlu diperhatikan adalah menurunnya nilai volume perdagangan Indonesia-Malaysia pada Pemerintahan Najib Razak.

Berdasarkan Tabel 1 di bawah, sejak tahun 2013 sampai tahun 2016, total nilai perdagangan Indonesia-Malaysia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan itu disayangkan kedua negara karena komoditas yang diperdagangkan bersifat saling melengkapi. Jadi kedua negara saling membutuhkan satu sama lain. Adapun komoditas Indonesia yang diekspor ke Malaysia antara lain pakaian (tekstil dan produk tekstil), peralatan listrik, kelapa sawit, kimia dasar organik dari produk pertanian, suku cadang kendaraan bermotor empat roda dan lainnya, logam mulia, besi/baja, produk-produk kertas lainnya, ban luar dan ban dalam, perangkat komputer, tembaga, bubur kertas, dan udang beku. Sedangkan barang yang diimpor Indonesia dari Malaysia adalah kedelai, gula pasir, daging ayam, dan minyak goreng.

Meskipun mengalami penurunan selama empat tahun, namun pada tahun 2017 volume perdagangan kedua negara mulai meningkat secara perlahan menjadi USD 17.325.725,7. Adanya peningkatan nilai dari total

Tabel 1. Volume Perdagangan Indonesia-Malaysia Tahun 2013-2017 (nilai: ribu dollar AS)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Ekspor	10.666.609,4	9.730.010,8	7.630.854,6	7.121.665,7	8.467.527,3
Impor	13.322.533,0	10.855.394,4	8.530.667,5	7.200.944,3	8.858.198,4
Total	23.989.142,4	20.585.405,2	16.161.522,1	14.322.610,0	17.325.725,7

Sumber: "Neraca Perdagangan Indonesia dan Malaysia Tahun 2013-2017", diakses dari <http://www.kemendag.go.id> pada tanggal 14 Mei 2018.

perdagangan kedua negara pada tahun 2017 itu menunjukkan bahwa Malaysia sudah mulai menambah pembelian produk Indonesia, di antaranya beras. Keinginan tersebut disambut Indonesia dengan mulai mengekspor beras ke Malaysia sebanyak 25 ribu ton pada Oktober 2017. Selain itu, Indonesia berharap agar ke depan Malaysia dapat mengalokasikan 20% dari kuota impor berasnya, yakni dengan membeli sekitar 150 ribu ton beras produk Indonesia. Dengan kepemimpinan Mahathir, diharapkan jumlah total nilai perdagangan kedua negara ke depan dapat semakin meningkat.

Selain di sektor perdagangan, kerja sama investasi kedua negara juga diharapkan dapat semakin diperluas. Selama ini kerja sama investasi kedua negara lebih banyak dilakukan pada sektor telekomunikasi, perbankan, perkebunan, hotel, restoran, pertambangan serta minyak dan gas. Dengan terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru diharapkan terdapat pengembangan ruang lingkup kerja sama ekonomi kedua negara, karena masih banyak potensi investasi yang dapat ditingkatkan dan dengan demikian mampu menambah nilai manfaat bagi kedua negara.

Di samping menaruh harapan positif pada peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara, dengan terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap isu perlindungan TKI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia. Kerja sama kedua negara dalam menangani persoalan TKI ini masih diperlukan karena masih banyak TKI yang tinggal dan bekerja di Malaysia baik yang secara legal/sah maupun yang tanpa ijin.

Sebenarnya sudah ada upaya-upaya kedua negara untuk menyelesaikan persoalan TKI di Malaysia. Misalnya, Malaysia telah bekerja sama dengan Indonesia dalam program pulang sukarela. Program ini merupakan program Pemerintah Malaysia untuk memulangkan Pekerja Asing Tanpa Ijin (PATI) ke negara asalnya, termasuk ke Indonesia, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017 lalu. Sejak tanggal 1 Juli 2017, Malaysia telah menangkap sebanyak 197 orang WNI pada saat pelaksanaan operasi razia di wilayah Semenanjung. Untuk menyikapi persoalan TKI tersebut, Pemerintah Indonesia perlu semakin intens berkomunikasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia karena persoalan ini menyangkut kedua belah pihak (pekerja dan majikan).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebanyak 30,815 orang TKI yang bekerja di Malaysia secara sah pada tahun 2016. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 25,511 orang TKI. Meskipun sempat menurun, namun jumlah ini justru meningkat tajam pada April 2018 menjadi sebesar 32,389 orang. Bahkan, jumlah ini pun mungkin akan meningkat jika ditambah dengan TKI yang bekerja di Malaysia tanpa memiliki Ijin. Besarnya jumlah TKI ini membuktikan bahwa masih besarnya minat para TKI untuk bekerja di Malaysia walaupun sudah ada banyak muncul kasus kekerasan yang telah menimpa TKI di Malaysia.

Dengan terpilihnya kembali Mahathir, diharapkan Pemerintah Malaysia bersedia turut serta dalam pembahasan pasal-pasal yang ada dalam “Konsensus ASEAN tentang

Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran". Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat mengarahkannya bagi kepentingan Indonesia terutama dalam pembahasan nota kesepahaman perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia.

Prioritas Perdana Menteri Mahathir setelah membentuk kabinetnya adalah menyelesaikan kasus korupsi Pemerintahan Najib Razak serta mulai memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri Malaysia. Tujuan utama dari kemunculan kembali Mahathir sebagai Perdana Menteri saat ini lebih untuk memperbaiki kondisi dalam negeri Malaysia. Hal ini tidak mudah apalagi target waktunya hanya sampai dua tahun ke depan saja. Dari sini dapat dilihat bahwa selama dua tahun ke depan, prospek hubungan bilateral Indonesia-Malaysia mungkin belum akan sesuai dengan harapan Indonesia. Kendati demikian, Indonesia masih memiliki prospek positif terhadap penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia karena keikutsertaan Anwar Ibrahim di dalam pemerintahan Mahathir. Mahathir telah berjanji bahwa Ia akan menunjuk Anwar Ibrahim sebagai penggantinya setelah dua tahun ke depan.

Anwar Ibrahim merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat yang memiliki kedekatan khusus dengan tokoh-tokoh di Indonesia. Meskipun Anwar telah dicopot dari jabatannya beberapa tahun yang lalu, namun Anwar sebagai seorang tokoh Malaysia sering diundang ke Indonesia untuk diberikan kesempatan dalam mengeluarkan pendapatnya. Bahkan, setelah dibebaskan dari penjara baru-baru ini Anwar Ibrahim telah berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Indonesia Ke-3 B.J. Habibie dalam rangka memperingati

dua puluh tahun reformasi dan menjumpai Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta. Kedatangan Anwar Ibrahim ke Indonesia ini merupakan wujud besarnya kepedulian dan perhatiannya terhadap Indonesia. Dengan demikian diharapkan pada waktu Ia nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Mahathir, Anwar Ibrahim juga akan memberikan perhatian khusus kepada Indonesia.

Penutup

Terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia perlu disambut baik oleh Indonesia, dengan harapan hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia akan semakin meningkat. Terlebih lagi pemerintahan koalisi Mahathir saat ini mendapat dukungan penuh Anwar Ibrahim, salah satu tokoh penting Malaysia yang telah dipersiapkan Mahathir Mohamad untuk menggantikannya sebagai perdana menteri dalam dua tahun ke depan, dan memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh politik dan pemimpin Indonesia. Indonesia dan Malaysia, perlu mengarahkan hubungan bilateralnya ke arah kerja sama yang lebih konstruktif, tidak saja bagi kemajuan kedua negara tetapi juga bagi kemajuan kawasan. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia yang konstruktif ini sudah tentu tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh masyarakat dan juga parlemen kedua negara.

Referensi

"Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Periode Bulan April Tahun 2018", http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_16-05-2018_112822_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_April_1.pdf, diakses 22 Mei 2018.

"Mahathir Mohamad Pimpin Malaysia Dua Tahun Saja", *Media Indonesia*, 16 Mei 2018 hal. 14.

"Malaysia Belajar dari Reformasi Indonesia", *Republika*, 21 Mei 2018, hal. 1.

Mazrieva, Eva, "Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perdagangan, Perburuhan dan Perbatasan", <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-perkuat-kerja-sama-perdagangan-perburuhan-dan-perbatasan/4131276.html>, diakses 15 mei 2018.

"Neraca Perdagangan Indonesia dan Malaysia Tahun 2013-2017", <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=124>, diakses 14 Mei 2018.

Nizar, Yaakub Ahmad, "Malaysia and Indonesia: A Study of Foreign Policies With Special References to Bilateral Relations", research-repository.uwa.edu.au/files/3229040/Yaakub_Ahmad_Nizar_2009.pdf, diakses 15 Mei 2018.

"Persaingan Sengit Menuju Kursi Kekuasaan", *Kompas*, 5 Mei 2018 hal. 8-9.

"Polisi Sita Uang Senilai Rp.1,9 M dari Rumah Najib", *Suara Pembaruan*, 19-20 Mei 2018, hal 15.

"Reformasi Harus Dituntaskan", *Media Indonesia*, 21 Mei 2018, hal. 2.

"Usai Dilantik, Janji Kembalikan Dana Pembangunan yang Dikorup", *Radar Papua*, 12 Mei 2018, hal. 14.



Lisbet
lisbet.sihombing@dpr.go.id

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.